

	News Title : Bappebti Lakukan Penanganan Aduan Berjangjang dan Telah Sesuai Peraturan di Bidang PBK	
	Media Name : Wahananews.co	Journalist : JP Sianturi
	Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : home	Topic : Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjangjang

Bappebti Lakukan Penanganan Aduan Berjangjang dan Telah Sesuai Peraturan di Bidang PBK



Wahananews.co, Jakarta – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjangjang. Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengaman sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang PBK.

Baca Juga:
Industri Kripto Siap Hadapi Bonus Demografi



Demikian diutarakan Plt. Kepala Bappebti Kasan merespons pemberian Ombudsman RI terkait penanganan pengaduan nasabah pilang berjangka.

"Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjangjang. Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengaman sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK)."

Kasan menambahkan, terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPKI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pembelian anasir nasabah.

Baca Juga:
Ditingkatkan Kualitas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti Terapkan Penilaian Berkala Berkelanjutan

Leluh lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain melalui penguatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating pilang berjangka.

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama seperti dengan Kepala Ageng RI. Bappebti juga merupakan anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKSI).

Di forum internasional, Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 di Paris, Prancis. Kegiatan tersebut menunjukkan peran aktif Bappebti dalam memawasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama 2023, imbuh Kasan, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perselisihan pilang berjangka. Dari seluruh aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Untuk mengurangi jumlah aduan tersebut, hal terpenting yang dilakukan Bappebti adalah penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK), LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep-2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Saat ini, telah terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikat LSP-PBK dari BNSP. Dalam waktu dekat, LSP-PBK akan melaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang PBK untuk Wakil Pilang Berjangka (WPB) dan Wakil Pemusnah Berjangka (WPA) melalui ujian kompetensi dan pemertihan Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP).

Untuk menjadi WPB atau WPA, pemegang TLUP harus mengajukan izin kepada Bappebti untuk dilatih kembali kejaksaannya. Melalui skema bertahap ini, diharapkan SDM di bidang PBK akan lebih kompeten sesuai dengan bidang kejaksaannya, baik sebagai WPB maupun WPA.

Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi penurunan aduan nasabah di bidang PBK. Penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi dan SDM berkualitas adalah salah satu strategi untuk Bappebti bersama para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja PBK.

Strategi lainnya yaitu optimalisasi bursa crude palm oil (CPO), penguatan ekosistem bursa anasir minyak, peningkatan transaksi multilateral, antara lain komoditas timah dan emas digital, serta pengembangan komoditas strategi lainnya.

Berikutnya optimisasi sistem nilai gudang dan penguatan pasar hilir komoditas serta perbaikan tata kelola layanan Bappebti yang berkelanjutan.

[Redaktur: Tumpal Ajendra Gutman]